



Fakultas Ilmu Sosial &
Ilmu Politik

MANAJEMEN PUBLIK

MAKNA KEPUBLIKAN (PUBLICNESS) DALAM MANAJEMEN PUBLIK

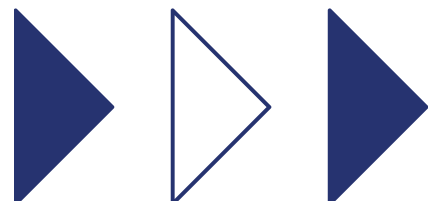
KHAIRINNUR ANNASTASYA
2316041112



CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pemahaman mengenai publicness merupakan fondasi dalam kajian manajemen publik karena menjelaskan karakteristik organisasi publik, orientasi penyelenggaraan pemerintahan, serta hubungan antara negara dan masyarakat. Penguasaan konsep ini memungkinkan mahasiswa menganalisis praktik manajemen publik tidak hanya dari aspek efisiensi organisasi, tetapi juga dari perspektif kepentingan publik (public interest) dan penciptaan nilai publik (public value).

Capaian Pembelajaran: Menjelaskan konsep publicness, mengidentifikasi dimensi publicness, menganalisis hubungan publicness dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan mengkaji implementasi publicness.



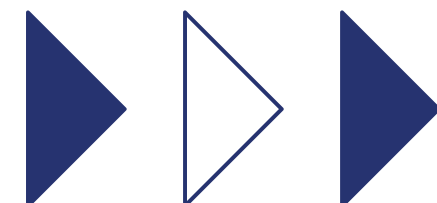


PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sektor publik tidak lagi diukur hanya berdasarkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menciptakan manfaat bagi masyarakat. Organisasi publik memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara secara akuntabel, memenuhi kepentingan publik, serta menjaga legitimasi pemerintahan melalui penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, konsep publicness menjadi landasan normatif sekaligus operasional dalam praktik manajemen publik.

Urgensi Publicness dalam Manajemen Publik

- Orientasi pada kepentingan publik
- Mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
- Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas
- Memperkuat legitimasi pemerintah



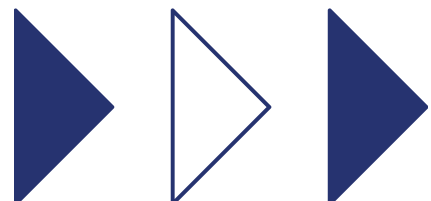


KONSEP PUBLICNESS

Istilah publicness mengacu pada derajat keterikatan suatu organisasi terhadap kepentingan publik, otoritas politik, nilai-nilai demokrasi, serta mekanisme akuntabilitas publik. Berbeda dengan pandangan tradisional yang mengidentikkan organisasi publik berdasarkan status kepemilikannya, perspektif modern memandang publicness sebagai suatu spektrum yang dipengaruhi oleh hubungan organisasi dengan lingkungan politik, sosial, dan kelembagaan. Dengan demikian, organisasi nonpemerintah pun dapat memiliki tingkat publicness yang tinggi apabila menjalankan fungsi pelayanan publik dan tunduk pada nilai-nilai kepublikan.

Karakteristik Konsep Publicness

- Berorientasi pada kepentingan publik
- Dipengaruhi oleh otoritas politik
- Berdasarkan nilai-nilai publik
- Mengutamakan penciptaan nilai publik





PUBLICNESS MENURUT PARA AHLI

Barry Bozeman

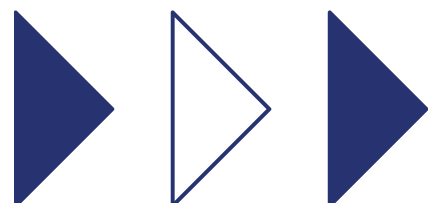
- Bozeman (1987; 2007) menyatakan bahwa publicness merupakan tingkat pengaruh otoritas politik (political authority) terhadap perilaku organisasi. Dengan demikian, organisasi swasta pun dapat memiliki tingkat publicness yang tinggi apabila aktivitasnya diatur secara ketat oleh pemerintah dan berorientasi pada kepentingan publik.

David H. Rosenbloom

- Rosenbloom menegaskan bahwa organisasi publik harus mengintegrasikan perspektif politik, hukum, dan manajemen secara seimbang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dwight Waldo

- Waldo memandang administrasi publik sebagai aktivitas yang sarat dengan nilai (value-laden activity), sehingga penyelenggaraan organisasi publik tidak dapat dipisahkan dari demokrasi, etika, dan kepentingan masyarakat.





PERKEMBANGAN PARADIGMA

01.

OPA

Paradigma ini menekankan birokrasi yang hierarkis, kepatuhan terhadap hukum, serta pengendalian administratif.

02.

NPM

Mengadopsi praktik manajemen sektor privat dengan menekankan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan pengukuran kinerja.

03.

NPS

Menurut Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, pemerintah seharusnya melayani warga negara (serving rather than steering), bukan sekadar mengelola organisasi secara efisien.

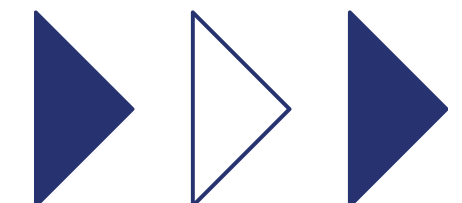




KARAKTERISTIK ORGANISASI PUBLIK

Organisasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi sektor privat karena dibentuk untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada tujuan organisasi, tetapi juga pada sumber daya yang digunakan, mekanisme pengambilan keputusan, serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan kepada publik.

- Berorientasi pada kepentingan publik
- Menggunakan sumber daya publik
- Dipengaruhi lingkungan politik
- Memiliki akuntabilitas yang luas
- Berorientasi pada pelayanan

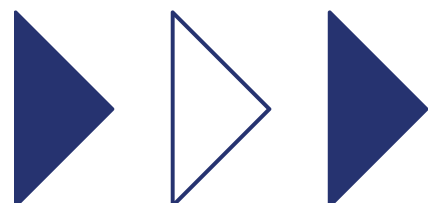




DIMENSI PUBLICNESS

Barry Bozeman mengemukakan bahwa publicness bukan merupakan kategori yang bersifat dikotomis (publik atau privat), melainkan suatu spektrum yang dapat diukur melalui beberapa dimensi.

1. Political Authority: Menggambarkan tingkat pengaruh pemerintah dalam menetapkan kebijakan, regulasi, dan pengambilan keputusan organisasi.
2. Economic Authority: Menunjukkan sejauh mana pemerintah mengendalikan sumber daya ekonomi, pendanaan, dan alokasi anggaran organisasi.
3. Ownership: Menjelaskan bentuk kepemilikan organisasi, baik milik pemerintah, swasta, maupun organisasi campuran (hybrid organization), yang memengaruhi karakter organisasi.
4. Public Values: Menggambarkan tingkat komitmen organisasi terhadap nilai-nilai publik seperti transparansi, keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas.



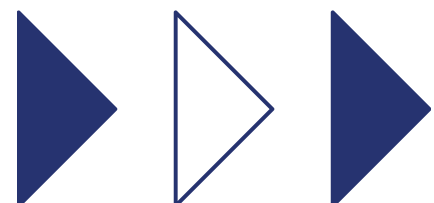


NILAI-NILAI PUBLICNESS

Implementasi publicness tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi juga pada nilai-nilai yang menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai standar etik sekaligus prinsip operasional dalam menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Nilai-nilai dalam publicness:

- Akuntabilitas (Accountability)
- Transparansi (Transparency)
- Responsivitas (Responsiveness)
- Keadilan dan Kesetaraan (Equity & Equality)
- Partisipasi (Participation)



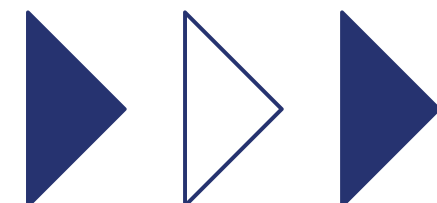


PUBLICNESS & PUBLIC INTEREST

Hakikat publicness adalah mewujudkan kepentingan publik (public interest), yaitu kondisi ketika kebijakan dan pelayanan pemerintah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, setiap keputusan publik harus mempertimbangkan aspek keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Orientasi Public Interest

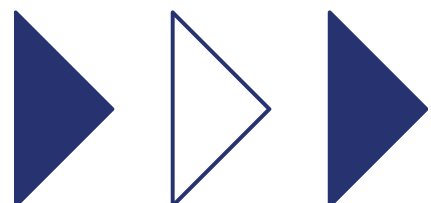
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
- Penciptaan kesejahteraan kolektif
- Perlindungan hak warga negara
- Peningkatan kepercayaan publik





PUBLICNESS DALAM FUNGSI MANAJEMEN PUBLIK

1. Perencanaan (Planning): Perencanaan program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan hasil identifikasi masalah publik. Perencanaan yang baik memastikan kebijakan memiliki legitimasi dan relevansi terhadap kepentingan masyarakat.
2. Pengorganisasian (Organizing): Pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas, koordinasi antarunit, serta pemanfaatan sumber daya publik secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pelayanan.
3. Pelaksanaan (Leading/Actuating): Kepemimpinan dalam organisasi publik diarahkan untuk membangun budaya pelayanan, mendorong kolaborasi, dan memastikan setiap kebijakan dilaksanakan sesuai prinsip publicness.
4. Pengawasan (Controlling): Pengawasan bertujuan memastikan seluruh kegiatan organisasi sesuai dengan regulasi, standar pelayanan, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi publik.





PUBLICNESS DALAM PELAYANAN PUBLIK

01.

Akses Pelayanan

Layanan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial.

02.

Kualitas Pelayanan

Mengadopsi praktik manajemen sektor privat dengan menekankan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan pengukuran kinerja.

03.

Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan publik.

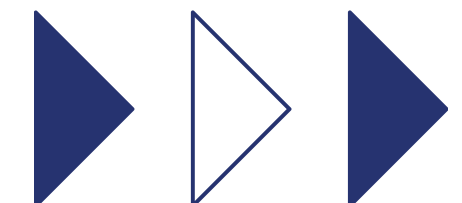




PUBLICNESS DALAM GOOD GOVERNANCE

Konsep publicness memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip good governance. Keduanya sama-sama menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan publicness akan memperkuat tata kelola pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Hubungan dengan Prinsip Good Governance: Partisipasi (Participation), Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (Transparency), Responsivitas (Responsiveness), dan Supremasi Hukum (Rule of Law)



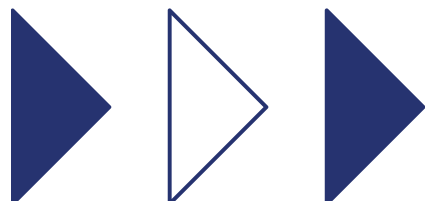


PUBLICNESS & PUBLIC VALUE

Menurut Mark H. Moore, public value merupakan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai hasil dari kebijakan dan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, publicness menjadi prasyarat penting dalam penciptaan nilai publik.

Hubungan Publicness dengan Public Value

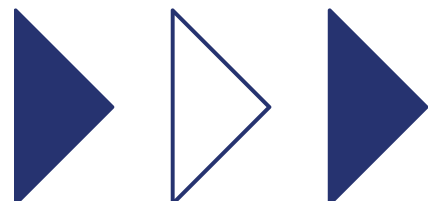
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial.
2. Membangun kepercayaan publik: Pelayanan yang transparan, adil, dan akuntabel meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
3. Mendorong kolaborasi: Penciptaan nilai publik memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas.
4. Mewujudkan keberlanjutan kebijakan





IMPLEMENTASI PUBLICNESS DALAM ORGANISASI PUBLIK

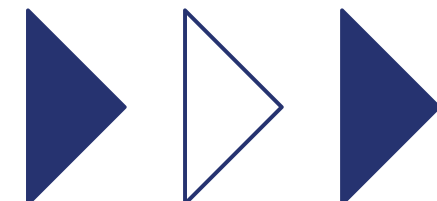
- Kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, didukung data empiris, serta mempertimbangkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan.
- Organisasi memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Implementasi publicness diperkuat melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.





PERBANDINGAN ORGANISASI PUBLIK & ORGANISASI PRIVAT

Meskipun organisasi publik dan organisasi privat sama-sama menerapkan prinsip-prinsip manajemen, keduanya memiliki orientasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan ukuran keberhasilan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tingkat publicness yang dimiliki masing-masing organisasi. Organisasi publik berorientasi pada pencapaian kepentingan masyarakat (public interest), sedangkan organisasi privat berorientasi pada penciptaan keuntungan (profit maximization). Oleh karena itu, pendekatan manajerial sektor privat tidak dapat diadopsi sepenuhnya dalam sektor publik.





TANTANGAN IMPLEMENTASI PUBLICNESS

- Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan

Praktik korupsi menghambat efektivitas pelayanan publik, mengurangi efisiensi penggunaan anggaran, serta menurunkan legitimasi pemerintah.

- Intervensi politik

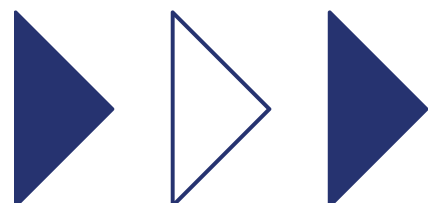
Kepentingan politik dapat memengaruhi objektivitas penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga menggeser orientasi dari kepentingan publik.

- Birokrasi yang kompleks

Prosedur administrasi yang panjang dan berlapis menyebabkan pelayanan menjadi lambat, kurang adaptif, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat

- Transformasi digital

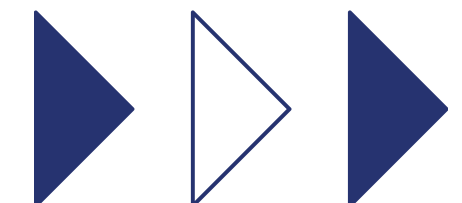
Digitalisasi pelayanan menuntut kesiapan infrastruktur, peningkatan kompetensi aparatur, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan





PUBLICNESS DI ERA DIGITAL

Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan tata kelola. Pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memperkuat implementasi publicness melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas pelayanan. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada warga negara.

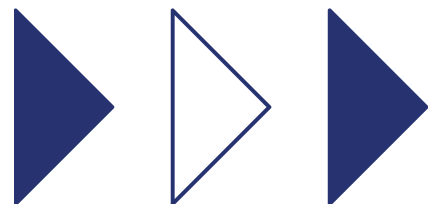
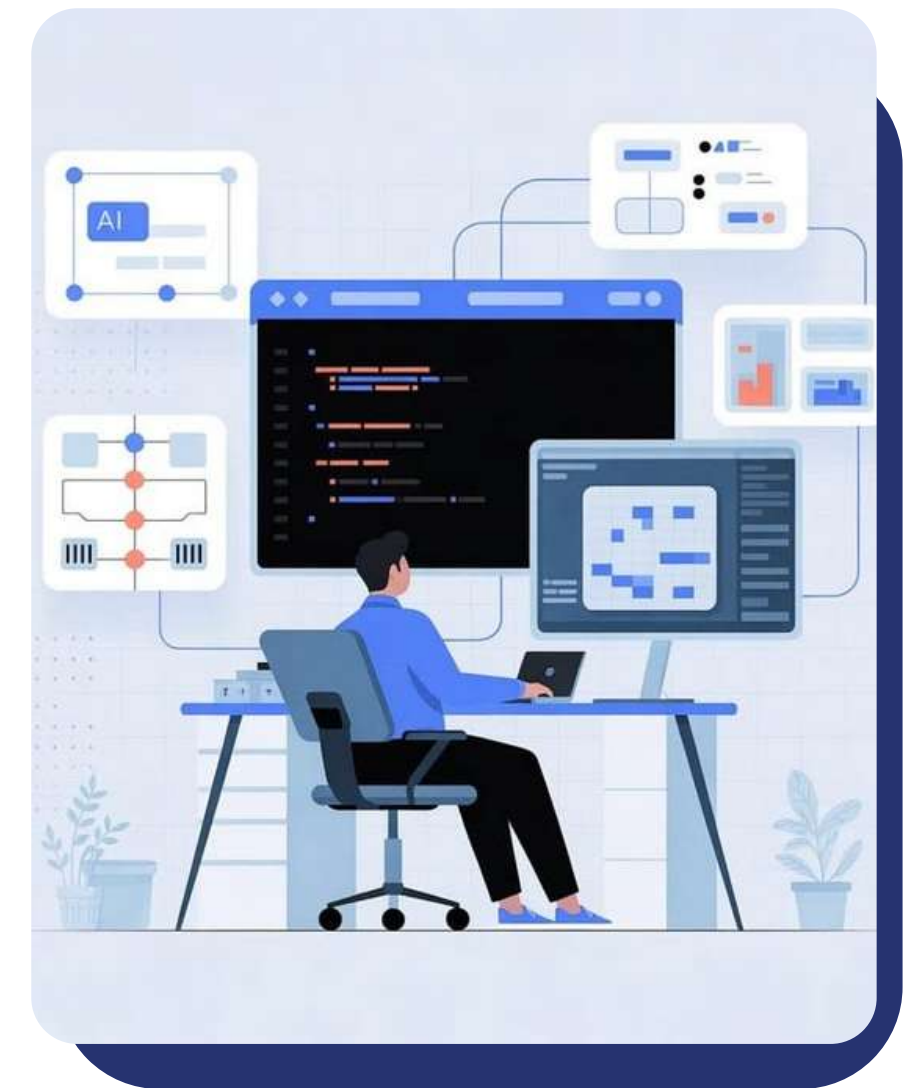




STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PUBLICNESS MELALUI MAL PELAYANAN PUBLIK

Salah satu contoh implementasi publicness di Indonesia adalah pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP mengintegrasikan berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor lainnya dalam satu lokasi pelayanan. Integrasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kompleksitas birokrasi, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

Analisis Implementasi Publicness: Integrasi pelayanan, peningkatan efisiensi, transparansi pelayanan, peningkatan kepuasan masyarakat.





ANALISIS PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PUBLICNESS

Maladministrasi

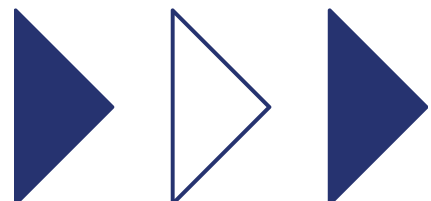
- Penyimpangan prosedur pelayanan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh haknya secara optimal dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pungutan liar

- Praktik pungutan di luar ketentuan mencerminkan rendahnya integritas aparatur serta bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan.

Diskriminasi pelayanan

- Perbedaan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun kedekatan tertentu bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Menciptakan ketidakpercayaan publik.

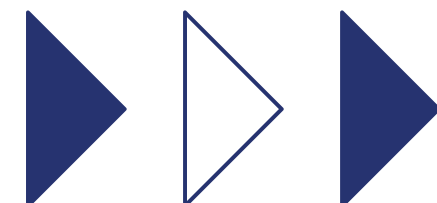




STRATEGI PENGUATAN PUBLICNESS

Penguatan publicness merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Strategi ini tidak hanya berfokus pada perubahan prosedur administratif, tetapi juga mencakup reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, publicness dapat diinternalisasikan sebagai budaya organisasi dalam sektor publik.

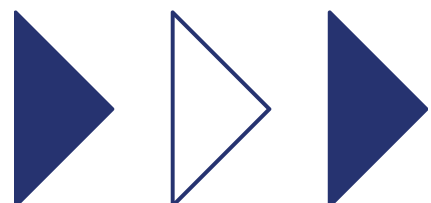
Strategi Penguatan: Reformasi birokrasi, penguatan integritas aparatur, digitalisasi pelayanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan evaluasi berbasis kinerja





PERAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MEWUJUDKAN PUBLICNESS

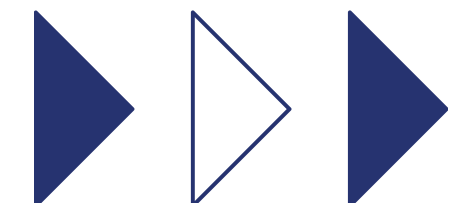
Sebagai penyelenggara pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi strategis dalam mengimplementasikan nilai-nilai publicness. Keberhasilan organisasi publik tidak hanya ditentukan oleh sistem atau regulasi, tetapi juga oleh kapasitas, integritas, dan profesionalisme aparatur yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, ASN dituntut menjadi pelayan masyarakat (public servant) yang mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.





REFLEKSI KRITIS

Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, implementasi publicness masih menghadapi tantangan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan refleksi kritis untuk menilai sejauh mana organisasi publik benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan birokrasi atau politik. Refleksi ini penting sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.





KESIMPULAN

Publicness merupakan karakter utama organisasi publik

- Organisasi publik dibentuk untuk memenuhi kepentingan masyarakat sehingga seluruh aktivitasnya harus berorientasi pada public interest.

Publicness diwujudkan melalui nilai-nilai kepublikan

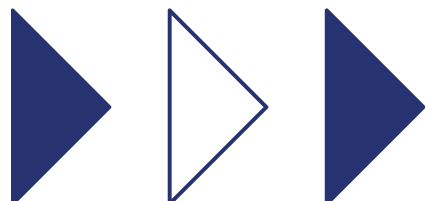
- Akuntabilitas, transparansi, responsivitas, partisipasi, dan keadilan menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Implementasi publicness menghasilkan public value

- Penerapan publicness yang konsisten akan meningkatkan kualitas pelayanan, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi pemerintah.

Penguatan publicness memerlukan komitmen berkelanjutan

- Reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kompetensi ASN, dan kolaborasi dengan masyarakat merupakan faktor penting dalam memperkuat implementasi publicness.





Fakultas Ilmu Sosial &
Ilmu Politik

MANJEMEN PUBLIK

SEKIAN TERIMA KASIH

Sesi tanya jawab dibuka!
Silakan angkat tangan apabila ada yang ingin ditanyakan,
sebab malu bertanya sesat di jalan.

SELESAI